

KERABAT

Media Informasi Kementerian Agama Kalimantan Selatan

Setuju Dalam Nuansa Perbedaan



JAGA KEBERSAMAAN UMAT



9 772477 565009

Edisi 86
Catur Wulan I 2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya



Moderasi untuk Kebersamaan Umat



Buletin Kerabat edisi terbaru di awal tahun 2019 ini dengan tema 'Jaga Kebersamaan Umat', mengusung tema besar

dari HAB (Hari Amal Bakti) ke 73

Kementerian Agama, dengan harapan agar 'pesan' berupa instruksi ini dipahami secara benar, diteruskan dan tersampaikan terus menerus, baik secara verbal maupun naratif melalui teks-teks tulisan serta disebarluaskan kepada publik terutama kepada pemangku kepentingan bahkan sampai ke akar rumput. Selain itu, edisi kali ini juga memuat kolom penuh dari sambutan Menteri Agama pada RAKERNAS Tahun 2019 yang menghasilkan satu ringkasan 'mantra' magis : Moderasi Beragama, yang seringkali digunakan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dengan harapan besar kepada semua elemen untuk menyatukan pikiran, sikap dan tindakan untuk menjangkau seluruh sasaran yaitu mengantarkan umat beragama dan bangsa ini menuju peradaban yang lebih baik. Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut

kita tidak bisa bergerak sendir-sendiri, harus berjalan beriringan, membutuhkan sinkronisasi, sinergitas dan kerjasama, yang kita biasanya mengenalnya dengan "kebersamaan". Karenanya, kita punya momentum untuk menjadikan Tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama, Caranya dengan menjadikan jargon Moderasi Beragama sebagai ruh dan kata kunci yang harus menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan. tegas Menag.

Sudah sepatutnya buletin ini tidak ketinggalan dalam menyambut isu-isu di atas, dan semoga berbagai tulisan dalam buletin Kerabat kali ini dapat menjadi suntikan semangat bagi semua elemen mampu menjaga "Kebersamaan Umat" dalam menyongsong bersamaan datangnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

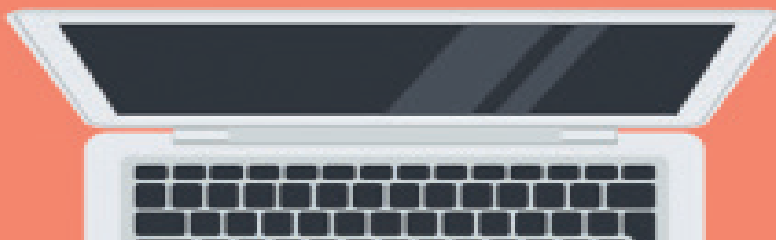
"Seorang moderat mampu mengukur diri dalam memposisikan substansi dan merespon situasi. Jadilah moderator yang mampu memoderasi umat beragama menjaga kebersamaan,"

REDAKSI Kerabat

PEMBINA : Drs. H. Noor Fahmi, MM
PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Muslim, M.Pd.I
REDAKTUR : H. Ahmad Kamal, S.HI, M.Ag
PENYUNTING/EDITOR : Badariyah, S.Ag,
DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER : Rajudin, S.AP
SEKRETARIAT
(Pengumpul Bahan/Artikel):
Jain Rahman, S.Kom, Marianti, SEI
(Dokumen) :Rahma Widiyawati, SE
(Editing) Nur Shadrina Maulidina, Eka Susana, SE
(Distribusi) Rhoma Wijaya, SH.I
Akhmad Ramadhan, S.Kom

Ijin Terbit:

SK. Menpan RI No 1958/DITJEN BPG/SPP/1993. Tanggal 27 Desember 1993
Penerbit : Sub. Bagian Informasi dan Humas
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin. Telp. (0511) 3353472 / 085245677171
Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id





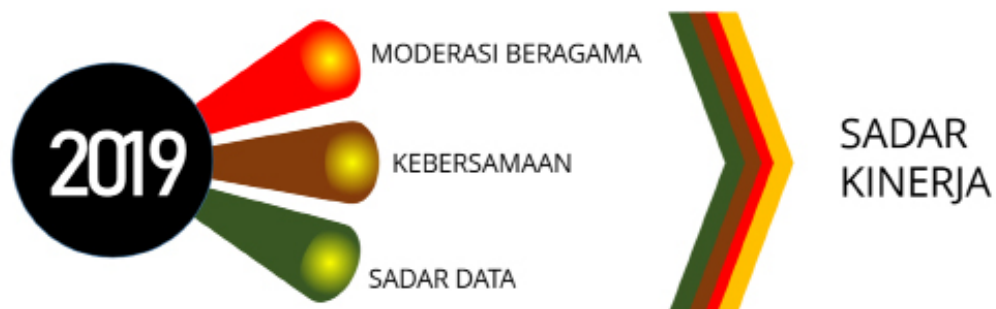
SINERGITAS DAN INTEGRASI PELAKSANAAN PROGRAM 2019

[SEKRETARIAT JENDERAL]

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT RISALAH JAKARTA



TINDAK LANJUT PELAKSANAAN HASIL RAKERNAS 2019



PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN 2019



- Negara hadir menanggapi kebutuhan publik dalam bentuk program strategis
- Berikan kemudahan untuk mengakses pelayanan-pelayanan di Kementerian Agama
- Respon dengan cepat (jemput bola) terkait dengan isu-isu keagamaan di masyarakat
- Menjadikan "Moderasi Beragama" sebagai ruh dalam setiap program bagi umat
- Optimalkan peran dosen, guru, penyuluh agama, pengawas pendidikan dan penghulu dalam mendukung moderasi beragama
- Mendorong peran serta ASN Kemenag dalam mengkampanyekan moderasi beragama pada masyarakat
- Tingkatkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dan instansi pemerintahan
- Optimalkan pemanfaatan sumberdaya organisasi, pegawai dan anggaran dalam mewujudkan moderasi beragama

PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN 2019



- Kebersamaan internal
- Sinergikan pelaksanaan program antar unit
- Sinergikan penggunaan sumberdaya anggaran, manusia, sarana dan prasarana, teknologi, data dan informasi
- Kebersamaan eksternal
- Laksanakan program yang berdampak langsung bagi umat secara berkeadilan
- Orientasikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh umat secara inklusif

PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN 2019



MANAJEMEN
BIG DATA
(integrasi, sinergi,
koneksi dan
kemasan)

- Benahi kebijakan dan regulasi pengelolaan data
- Tingkatkan kapasitas SDM pengelola data
- Lengkapi infrastruktur data
- Manfaatkan data dan informasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- Perbaharui data seiring dengan pelaksanaan program
- Lakukan pengolahan data sebagai dasar evaluasi kinerja yang terukur

Cover	01
Editorial dan Redaksi	03
Topik	04 - 05
Daftar Isi	06 - 07
Topik Utama	10 - 29
FOTO KERABAT	30 - 31
BERITA NASIONAL	32 - 37
BERITA PROVINSI	38 - 39
BERITA DAERAH	40 - 51
COVER BELAKANG	52



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi bersama Plh. Sekda Kalsel, Kabag TU Kanwil Kemenag Kalsel dan Perwakilan Tokoh Agama saat melepas bersama burung dara menandai dilepasnya secara resmi peserta Gerak Jalan Sehat Kerukunan, dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke 73 Kementerian Agama.

Pelaksanaan Gerak Jalan Sehat Kerukunan tersebut dilaksanakan di Halaman Depan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan (29/12/18)



**Kebersamaan Umat
Jadi Perhatian Kementerian Agama**

10

H. NOOR FAHMI
Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan



**Moderasi Untuk Kebersamaan
(Sepenggal Catatan dari Pemikiran Menag)**

14

H. Mukhlis Ridhani
Kasubbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama



Persatuan Sumber Kekuatan

17

H. Muslim
Kabag TU Kanwil Kemenag Kalsel



Persaudaraan Sejati

20

Sandra Mariyus
Plt. Pembimas Katolik



Ahimsa

23

Mercedes
Pembimas Hindu



Kebersamaan Umat Dalam Pandangan Agama Buddha

25

Joko Budi
Pembimas Buddha



**Miliki Hati Seorang Hamba
Dalam Bekerja dan Melayani**

28

Yusep
Pembimas Kristen



**UPACARA BENDERA, Puncak Peringatan Hari Amal Bakti ke 73
Kementerian Agama
yang di gelar di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin
di Landasan Ulin Banjarbaru
(03/01/19).**

Upacara Bendera tersebut di ikuti oleh Jajaran
Keluarga Besar Kementerian Agama Kalimantan
Selatan (Dok. Inmas)



Kebersamaan Umat Jadi Perhatian Kementerian Agama

Oleh : H. Noor Fahmi



Maasyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia juga merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat era reformasi saat ini adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu,

Buddha, dan Konghuchu. Agama yang terakhir inilah merupakan hasil era reformasi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan kehidupan antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota

kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari ledakan konflik antar umat beragama yang terjadi tiba-tiba yang masih terjadi di era reformasi saat ini.

Role Model Kebersamaan Umat bagi Masyarakat

Setiap insan yang ada dimuka bumi ini diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang unik. Satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Banyak perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Masyarakat Indonesia hendaknya menyikapinya dengan hal yang biasa, harus saling melengkapi, saling menguatkan, serta tidak paling merasa benar sendiri. Perspektif

agama dalam menyikapi hal diatas mempunyai peran yang sangat penting. Karena agama merupakan fondasi yang kuat dalam kehidupan ini. Diri kita sendiri harus menjadi role model atau contoh dalam masyarakat sekitar kita untuk menjaga kebersamaan umat. Kita tebarkan virus-virus yang bisa mempererat kebhinekaan kita. Dimulai dari diri kita sendiri.

Kementerian Agama memasuki usia yang ke-73 pada 3 Januari 2019. Usia yang sudah sangat dewasa dan matang untuk ukuran manusia. 3 Januari merupakan hari yang bersejarah bagi Kementerian Agama. Karena pada tanggal tersebut di tahun 1946 dibentuk Departemen Agama melalui Penetapan Pemerintah No I/SD tertanggal 3 Januari 1946 dengan HM. Rasjidi, BA terpilih menjadi Menteri Agama untuk pertama kalinya. Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama (HAB) 3 Januari adalah momentum yang tepat untuk membangkitkan kebersamaan umat. Kebersamaan umat juga merupakan fondasi yang tetap dipegang untuk menghalau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Indonesia dimasa depan nanti. Kebersamaan umat menjadi barang yang sangat mahal untuk sekarang ini.

Toleransi satu sama lain diantara keberagaman yang ada di Indonesia menjadi sangat penting. Seorang penjaga toleransi mendahulukan rekonsiliasi daripada relokasi. Mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah berucap bahwa kita semua berada disini karena kita yakin toleransi merupakan suatu keharusan bagi pembangunan manusia dan sosial. Begitu pentingnya toleransi dalam menjaga kebersamaan umat. Dengan adanya kebersamaan

umat, maka hasil akhirnya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Kementerian Agama Hadir untuk Menjaga Kerukunan dan Kebersamaan Umat

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam kamus bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga 1990, rukun berarti perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata rukun ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki.

Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengulur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi (penyimpangan).

Terkait kerukunan umat beragama, Kementerian Agama hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia



(NKRI) sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama menyertai denyut nadi kebangsaan kita. Kementerian Agama hadir bertugas sebagai pengawal dasar negara yaitu Pancasila, yang didalamnya mengandung nilai-nilai agama yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Sila Pertama, Ketuhanan yang maha esa adalah jantung nilai kebangsaan, tempat bertemunya semangat beragama dan cinta tanah air. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab berintikan ajaran universal semua agama dalam menghargai jiwa, kehormatan dan kehidupan setiap manusia. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia bermakna ikatan bangsa yang merajut keberagaman masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya bangsa yang terdiri dari banyak suku, agama, kepercayaan, adat istiadat tetapi bisa bersama dalam bingkai NKRI. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagai wujud sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan Kementerian Agama selalu mendorong untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman melalui demokrasi. Sila Kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diambil sebuah hikmah dalam kebijakan menggerakkan segenap sumber daya demi perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Memaknai Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama

Melalui peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan negara

kita berdasarkan Pancasila. Bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama. Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, yaitu “Jaga Kebersamaan Umat”, mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, apalagi di tahun politik sekarang ini, mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri diatas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan. Oleh karena itu, agar harmoni Persatuan dan Kesatuan masyarakat Indonesia tetap terjaga, mari kita jaga Kebersamaan Umat. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agamake-73. Jayalah Indonesia, Jayalah Kementerian Agama, Jaga Kebersamaan Umat!



**Kami Bangga
Jadi ASN
KEMENTERIAN AGAMA**



Moderasi Untuk Kebersamaan

(Sepenggal catatan dari pemikiran Menag)

Oleh: H. Mukhlis Ridhani



Menurut bahasa, kata ‘moderasi’ berasal dari Bahasa Latin *m o d e r â t i o*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti “penguasaan diri” (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata ‘moderasi’, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman.

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi

harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang

paripurna, dimana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan diantara mereka. Jelas, moderasi sangat erat terkait dengan toleransi.

Toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Kesediaan seperti itu sama sekali tidak berarti mengganggu, mengurangi, atau bahkan menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita. Justru agama mengajarkan agar setiap kita bersedia menghormati dan menghargai perbedaan keimanan atau

keyakinan yang ada pada pihak lain. Berkeyakinan adalah hak setiap manusia yang karenanya wajib dijaga bersama. Kita memiliki ajaran ‘tenggang rasa’, suatu warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan mampu ikut merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita.

Kebersamaan antar pemeluk agama yang berbeda-beda mutlak diperlukan. ‘Moderasi’ tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada salah satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Karena moderasi meniscayakan adanya sikap dan tindakan yang berimbang (balance) serta adil (justice). Tanpa keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama menjadi tidak efektif.

Moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangnya, keduanya harus mendekat dan saling menjemput titik persamaan ketimbang berkeras ‘mengorek-ngorek’ simpang perbedaan.

2019: Tahun Moderasi

Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan, nyatanya bukan hanya kebutuhan warga Kementerian Agama atau warga negara Indonesia saja, melainkan juga kebutuhan seluruh umat manusia di muka bumi.

Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan tahun 2019 ini sebagai “Tahun Moderasi

Internasional” (The International Year of Moderation). Penetapan ini

jelas sangat relevan dengan komitmen kita di Kemenag untuk terus menggaungkan moderasi dalam konteks beragama.

Karenanya, kita sekarang punya momentum untuk menjadikan Tahun 2019 ini sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama! Caranya dengan menjadikan jargon Moderasi Beragama sebagai ruh dan kata kunci yang harus menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan.

Moderasi Beragama perlu diejawantahkan dan bahkan dilembagakan dalam sistem dan struktur kerja satker-satker di Kementerian Agama. Ini supaya ruhnya tidak melekat pada seorang Menteri Agama belaka, yang niscaya akan datang dan

pergi silih berganti. Moderasi Beragama harus menjadi jiwa institusi Kementerian Agama, yang sepanjang keberadaannya akan terus mendapat amanah untuk mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia.

Mengelola Moderasi dan Kebersamaan di Era Disrupsi Mengapa bersikap moderat dan hidup damai dalam kebersamaan itu seolah menjadi barang mahal dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya ketika kita berbicara tentang kehidupan beragama di Indonesia? Dan khususnya lagi kalau mencermati isu-isu keagamaan di media sosial? Mengapa kepercayaan terhadap nilai moderasi dan kebersamaan tenggelam oleh semacam ‘keimanan’ terhadap berita bohong (hoaks)?

Moderasi Beragama perlu diejawantahkan dan bahkan dilembagakan dalam sistem dan struktur kerja satker-satker di Kementerian Agama.

Ini supaya ruhnya tidak melekat pada seorang Menteri Agama belaka, yang niscaya akan datang dan pergi silih berganti.

Moderasi Beragama harus menjadi jiwa institusi Kementerian Agama, yang sepanjang keberadaannya akan terus mendapat amanah untuk mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia.



Salah satu jawabannya barangkali adalah karena kita sekarang memasuki era keterbukaan yang nyaris tak terbatas (borderless); era keterbukaan dan ketakberbatasan yang diakibatkan oleh perkembangan cepat teknologi informasi, plus gonjang-ganjing politik yang timbulkan kegaduhan di sana-sini. Di era ini, terjadi perubahan mendasar bagaimana cara umat memperoleh pengetahuan agama. Belakangan ini pengetahuan agama tidak lagi selalu didapat melalui proses panjang mengkaji sumber primer yang utama, atau mengikuti pandangan sang guru yang memiliki keutamaan akhlak dan kedalaman ilmu, melainkan melalui jalan pintas yang serba instan, hitam putih, dan sering hanya menyediakan

tafsir kebenaran tunggal dalam beragama.

Masalahnya, perubahan serba cepat itu ternyata belum diimbangi dengan kesiapan para pemegang otoritas agama dalam menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sebagian para pemangku agama, dan juga akademisi bidang agama, seperti gagap dan terkaget-kaget menyaksikan perubahan kecenderungan beragama yang begitu cepat; belum tersedia jembatan yang dapat menghubungkan kekayaan wawasan pengetahuan mereka dengan kebutuhan generasi milenial yang sangat cepat dan dinamis.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan era disrupsi, suatu

keadaan terjadinya perubahan radikal yang sangat cepat akibat lahirnya era digital. Era ini mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, nyaris mengubah perilaku manusia di semua aspek, tak terkecuali di bidang agama.

Efek domino era disrupsi di bidang agama inilah yang menjadi alasan mengapa Kementerian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada akhir Desember 2018 lalu memfasilitasi dialog antar iman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat. yang menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai Risalah Jakarta.



Kementerian Agama RI, menggagas diadakannya Dialog Lintas Iman. Hasilnya, ada lima rumusan terkait situasi kebangsaan terakhir. Hasil ini disebut sebagai Risalah Jakarta.

Persatuan Sumber Kekuatan

Oleh: H. Muslim



Jenderal Besar Soedirman yang memimpin perlawanan rakyat melawan Belanda khususnya di Jawa Tengah dan Timur di masa revolusi kemerdekaan pernah mengatakan: kita tidak mungkin menang melawan musuh tanpa kekuatan, kita tak mungkin kuat tanpa persatuan, dan kita tak mungkin bersatu tanpa silaturahmi. Jadi, persatuan merupakan kata kunci, sesuatu yang sangat penting dan menentukan kekuatan dan kemenangan suatu bangsa dalam berjuang untuk mencapai cita-citanya. Tanpa adanya persatuan, maka sebesar apapun sebuah bangsa dan negara,

maka ia akan berpecah belah dan kehilangan kekuatannya. Kita lihat Rusia yang dulu bernama Uni Soviet sebagai salah satu negara superpower, setelah berpecah belah maka kekuatan dan kewibawaannya menjadi menurun di bawah Amerika Serikat. Kita lihat negara-negara Arab, meski diikat oleh kesamaan etnis dan agama, dan sudah pula diikat dalam organisasi Liga Arab, namun karena terpecah dalam 22 negara, maka kekuatan Arab seperti kurang diperhitungkan dalam kancah percaturan dunia internasional.

Begitu juga negara-negara Islam, meski diikat dalam Organisasi Konferensi Islam

(OKI) yang juga beranggotakan puluhan negara, namun karena tidak ada persatuan, maka OKI tampak lemah dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal, apalagi ikut serta dalam menyelesaikan persoalan global internasional. Persoalan Palestina, Rohingya dan Uighur saja, Liga Arab dan OKI tidak bisa menyelesaikan dan mengambil peran sentral, apalagi persoalan lainnya. Bahkan sesama Negara Arab dan anggota OKI juga banyak yang terlibat konflik dan sengketa.

Di negara kita sendiri, meskipun umat Islam mayoritas, namun kekuatan dan kualitasnya belum berbanding lurus dengan

kuantitasnya. Beberapa sektor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti sektor ekonomi, politik dan media massa, umat Islam masih kalah dengan umat atau golongan lain.

Skala Mikro

Contoh makro di atas menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan betapa buruknya dampak perpecahan. Namun rapuhnya persatuan tersebut tentu diawali dari lingkup mikro juga, yaitu lemahnya kebersamaan kita sebagai umat Islam khususnya dan sesama warga bangsa Indonesia pada umumnya.

Sekarang ini kita merasa bahwa persatuan ditubuh umat Islam masih lemah. Kita umat Islam begitu mudah berpecah belah, hanya karena perbedaan mazhab dan aliran agama, berbeda organisasi, berbeda

partai dan pilihan politik. Padahal perbedaan yang kita persoalkan tersebut, seringkali hanya dipicu oleh masalah furuiyah/cabang, bukan masalah ushuliyah/pokok. Masalah furuiyah sebenarnya hanya persoalan kecil dalam kehidupan beragama, tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan satu sama lain, sebab masing-masing pihak memiliki dasar dan alasan sendiri. Tetapi karena mempersoalkan yang kecil tadi, akhirnya energi kita habis dan akibatnya masalah besar keumatan dan kebangsaan sering terabaikan.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sudah terjadi perbedaan dalam masalah furuiyah tersebut. Oleh karena itu perbedaan tersebut akan selalu ada, karena cara berpikir orang pasti tidak sama satu

dengan lainnya. Membangun kebersamaan tentu tidak harus dengan menyamakan semua pikiran orang, melainkan membangun kesepahaman.

Kesepahaman tersebut adalah kesediaan dan kemauan untuk menerima pendapat, aliran, paham dan golongan yang berbeda, sehingga muncul istilah sebagaimana dikenalkan oleh Menteri Agama RI di tahun 1970-an Prof Dr H Abdul Mukti Ali MA, yaitu agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, merasa sama dalam keberbedaan.

Sikap dan pendapat yang mengedepankan kebersamaan ini, sangat efektif untuk membangun persatuan, kesatuan dan ukhuwah, baik ukhuwah islamiyah (sesama umat Islam), wathaniyah (sesama warga negara Indonesia) maupun basyariyah (sesama umat manusia).

"kita tidak mungkin menang melawan musuh tanpa kekuatan,
kita tak mungkin kuat tanpa persatuan,
dan kita tak mungkin bersatu tanpa silaturahmi,"

(Jendral Soedirman)





Ukhuwah islamiyah akan terbangun jika kita mengedepankan persamaan bukan perbedaan. Sebab sebanyak apa pun perbedaan kita dengan umat Islam golongan lain, pasti lebih banyak persamaannya. Kita sama-sama bersyahadat tauhid dan syahadat rasul, sama-sama salat, puasa di bulan Ramadhan dan berusaha untuk berhaji ke Baitullah yang merupakan kiblatnya umat Islam se-dunia. Yang berbeda paling-paling cara berniat dalam salat, ada tidaknya doa Qunut dalam salat Subuh, ada tidaknya talqin mayit, ada tidaknya iringan upacara selamatan arwah dan haul untuk orang meninggal, ada tidaknya peringatan hari-hari besar pada momentum tertentu dan sebagainya.

Kerukunan Umat

Rasa kebersamaan juga sangat membantu kerukunan

dan kesatuan ketika kita berinteraksi dengan penganut agama lain. Sebanyak apapun perbedaannya, pasti masih lebih banyak kesamaannya. Kita sama-sama punya nenek moyang yang pernah hidup di bawah kaki penjajah, sama-sama berjuang untuk kemerdekaan secara proporsional, relatif sama etnis dan warna kulit, sama bahasa dan budaya, dan sama-sama diikat oleh pilar-pilar penting negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinnka Tunggal Ika.

Apabila rasa kebersamaan ini terwujud dan terjaga dengan baik, maka daripadanya akan melahirkan kekuatan besar. Kalau dimasa perjuangan dulu kita mampu mengusir penjajah, maka di era pembangunan sekarang kita akan mampu mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti kemiskinan dan keterbelakangan dalam banyak aspek kehidupan. Energi kita

akan terfokus untuk hal-hal yang positif, tidak tergeres oleh hal-hal negatif. Dengan persatuan, kita akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah diadu-domba, ditekan dan dipengaruhi bangsa dan negara lain.

Kementerian Agama di Hari jadinya yang ke-73, sejak kelahirannya 3 Januari 1946 yang silam, diharapkan dapat memperkuat kesatuan dan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan sesama elemen bangsa. Persatuan dan kebersamaan tidak hanya penting saat kita melawan penjajah dulu, tetapi ia diperlukan setiap saat. Rahmat Allah hanya akan turun kepada umat yang senantiasa menjaga persatuan dan silaturahmi, dan akan menjauh ketika umat suka konflik dan berpecah-belah. Wallahu A'lam.

Persaudaraan Sejati

Oleh : Sandra Mariyus Adipa (Plt. Pembimas Katolik)



Pendahuluan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah Instansi Pemerintah yang keberadaannya merupakan amanat dari sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 Pasal 29, yang menyatakan (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pun telah menetapkan arah

perjuangannya melalui Visi “Terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen pancasilais dalam Negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika” dan Misi “Mengajak Masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya”.

Visi tersebut dicirikan salah satunya yaitu “Terwujudnya kerukunan hidup beragama Masyarakat Katolik dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Dan Misi tersebut dijabarkan dalam usaha-usaha:

a. Mengajak masyarakat Katolik untuk bersikap mengetahui, memahami, menghargai, dan

menghormati keanekaan dan kemajemukan yang ada di sekitarnya. Misalnya adat istiadat, budaya, suku, etnis, kebiasaan-attitude, agama, asal-usul, dll

b. Mengajak masyarakat Katolik berkiprah di tengah pembangunan bangsanya dengan semangat persaudaraan sejati;

c. Mengajak masyarakat Katolik menggenggam paham kita dalam pola pikir dan perilakunya. Misalnya: ini bangsa kita, Negara kita. Kota, jalan, jembatan, kantor, hotel, dermaga kita; Masjid kita, Gereja kita, Pura kita,



Klenteng kita, dan lain-lain asset bangsa ini milik kita. Semua ini harus kita jaga dan pelihara bersama.

Visi-Misi ini diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melalui Direktorat Urusan Agama Katolik dan Direktorat Pendidikan Katolik.

Persaudaraan Sejati

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama pada Tahun 2019 ini menghadirkan diri sebagai garda terdepan dalam membawa kedamaian yaitu melalui kegiatan-kegiatan pada bidang Urusan Agama Katolik dan Pendidikan Katolik.

Bidang Urusan Agama Katolik sendiri mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intern umat beragama Katolik. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kerukunan Umat Bergama Katolik. Kenapa perlu Indikator Kinerja Utama karena sebagai dasar pengukuran keberhasilan, pencapaian suatu tujuan (sasaran strategis) tersebut perlulah suatu Indikator Kinerja Utama. Adapun Variabel/Indikatornya yaitu:

1. Toleransi; sikap menerima apa adanya keyakinan yang berbeda yang dimiliki orang lain;
2. Kesetaraan; sikap tidak membedakan orang lain karena adanya perbedaan keyakinan;
3. Kerjasama; sikap mau bekerjasama dalam

kehidupan sosial dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Pada Tahun 2019 ini Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun kegiatan-kegiatan agar visi dan misi tersebut tercapai antara lain Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik, Pembinaan Para Pembina Keluarga Bahagia, Pembinaan Orang Muda Katolik.

Sehingga diharapkan Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan-kegiatannya dapat benar-benar menjadi Pembawa Kedamaian. Pembawa Kedamaian yang dimaksud yaitu menekankan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat Katolik dengan berupaya mengkristalkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan antara lain meningkatkan kerukunan umat beragama, baik internal maupun eksternal. Meningkatkan rasa damai dan

ketenteraman umat Katolik, melalui pelayanan 'kehadiran'.

Pelayanan kehadiran tanpa membeda-bedakan siapapun, pelayanan yang menekankan bahwa semua orang tanpa terkecuali adalah seperjalanan dalam ziarah menuju Allah. Semua orang terpanggil untuk Persaudaraan Sejati. Persaudaraan Sejati adalah persaudaraan yang berlandaskan pada Kemanusiaan.

Oleh karena itu Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjangkau dan merangkul masyarakat Katolik di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan agar secara aktif ikut dalam menjaga kebersamaan umat.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, perlu kiranya menjabarkan Persaudaraan Sejati secara konkrit dalam situasi pluri-agama dan pluri-kepercayaan/kebatinan. Beberapa pokok pikiran tentang hal itu adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya disadari bahwa umat beragama dan umat kepercayaan/kebatinan lain adalah rekan-rekan seperjalanan dalam ziarah menuju Allah.
2. Oleh karena itu semua orang tanpa terkecuali perlu menggalang kerekanan-kekerabatan-persaudaraan antar umat beragama dan umat kepercayaan/kebatinan yang ada di dalam masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Selatan, sebagai model bagi hubungan sosial.
3. Hubungan sosial dengan menjunjung tinggi dan menjaga moralitas hidup yang baik, ditandai dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai insani luhur dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup kemasyarakatan.



Om Swastyastu.

"AHIMSA"

Oleh : Mercedes (Pembimas Hindu)

Jangan baalah manangan, jangan
batulak sajian, suruh manang
pada manang, suruh baik pada
baik, sakurungan, sakandangan,
sabasar, saharungan, sabanuaan
sakacilnya.

Ahimsa tidak menyakiti sesama
Ahimsa tidak menyakiti satwa
Ahimsa tidak menyakiti rasa
Ahimsa tidak menyakiti asa

Ahimsa ajaran tentang toleransi
Ahimsa saling harga menghargai
Ahimsa tanpa bertindak
menyakiti
Ahimsa dapat hormat
menghormati

Ahimsa bermakna saling
mengasihi
Ahimsa berupaya saling
menyintai
Ahimsa ajaran untuk menyayangi
Ahimsa seluruh hidup harmoni
Ahimsa tuntunan buat semua
Ahimsa membina kerja sama
Ahimsa tirtha penyejuk atma
Ahimsa untuk menjalin rasa

Ahimsa tegakkan makna
persatuan
Ahimsa menjaga rasa
persaudaraan
Ahimsa tanpa melakukan
kekerasan
Ahimsa membina rasa
kebangsaan.

Ahimsa adalah pelita suci Hindu
untuk hidup saling mengasihi
sesama. Ahimsa yakni tidak
berperilaku menyakiti sarwa
ciptaan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa. Svaha.



Om santhi santhi santih om



Ahimsa atau ahimsa atau ahingsa, Ahimsa adalah sebuah istilah Sanskerta yang berarti "antikekerasan". Ahimsa merupakan bagian penting dari agama Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Konsep ini pertama kali digunakan dalam sebuah kitab Hindu yang disebut Upanishad, yang salah satu bagiannya berasal dari tahun 800 SM. Konsep ini kemudian dijelaskan lebih lanjut di Bhagavad Gita, Puranas dan kemudian teks-teks Buddhis.

Dalam kitab Manusmṛti, seorang pengikut Ahimsa adalah seorang vegetarian dan tidak membunuh atau melukai makhluk. Ahimsa adalah tugas utama dari semua kasta Hindu.

Konsep ini diperkenalkan kepada Barat oleh Mahatma Gandhi. Beberapa orang berpendapat, gerakan anti-kekerasan yang dilakukan Gandhi memengaruhi gerakan kemanusiaan yang lain seperti gerakan Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela.
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Ahimsa>)

Kebersamaan Umat Dalam Pandangan Agama Buddha

Oleh : Joko Budi (Pembimas Buddha)



Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagamaan dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa, yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami.

Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima

dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan.

Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, sang Buddha menganjurkan, "terdapat enam Dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari perpecahan, yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Keenam Dharma itu adalah:

1. Mengembangkan cinta kasih (metta) dalam perbuatan kita

sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dan persatuan akan terwujud.

2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etika baik, tak menyebarkan isu, gossip dan fitnahan.
3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka.
4. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial.
5. Melaksanakan moral (sila), etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain.
6. Mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan

membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan (Angguttara Nikaya III, 288-289).

Pandangan terhadap Agama lain.

Sang Buddha sudah terbiasa menghadapi pluralitas filsafat, ajaran dan praktik keagamaan di zamannya. Sebagai orang yang sangat bijaksana, Buddha tidak pernah menghakimi, dengan mengatakan hanya Buddha Dharma yang benar dan lainnya salah. Beliau membuka kemungkinan bagi guru lain untuk menemukan segi-segi kebenaran bagi dirinya sendiri. Pengakuan terhadap Paccekabuddha 'yang mencapai kesucian dengan

kemampuan sendiri, dapat menurunkan ajaran, tapi tidak mampu membimbing siswanya hingga mencapai kesucian'. Menunjukkan pandangan Buddha, bahwa mungkin saja ada kebenaran dalam ajaran (agama) lain, tapi bagaimanapun guru lain punya keterbatasan dalam membimbingan murid mencapai kesucian.

Agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan, yang penting cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Kepada Nigrodha, Buddha menjelaskan bahwa Ia menyampaikan ajaran tidak bertujuan mendapatkan

pengikut, atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Ia hanya menunjukkan cara membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk, yang menimbulkan akibat menyedihkan dikemudian hari (Digha Nikaya III:56-57).

Toleransi dan rasa hormat.

Toleransi dan rasa hormat merupakan dua kata yang amat penting, yang harus diingat dalam suatu masyarakat yang multi religius. Seseorang tidak boleh hanya mengkhotbahkan sikap tenggang rasa, tetapi harus berusaha, pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk selalu



melaksanakan semangat keramahan, toleransi, sebab semangat itu akan amat membantu menciptakan suasana yang mengarah pada kehidupan damai dan serasi.

Toleransi dan kerukunan beragama dalam sejarah agama Buddha.

Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi, kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha, agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih,

bukan dengan kekuasaan apalagi dengan kekerasan. Sang Buddha menjaga arus perpindahan agama dengan sangat hati-hati. Jenderal Siha, semula adalah penganut dan penunjang agama Jaina, mengajukan permohonan untuk diterima sebagai upasaka. Namun Buddha Gotama menganjurkan agar ia mempertimbangkan keputusan tersebut, mengingat pengaruh dan kedudukan jenderal itu sendiri. Sikap ini membuat Siha menjadi semakin kagum kepada Buddha. Orang lain justru sangat menginginkan dan akan mengumumkan ke seluruh negeri kalau seorang jenderal seperti dia menjadi pengikutnya (Vinaya-pitaka I:236-237).

Sabda-sabda Buddha.

Untuk mencapai kedamaian

Sang Buddha bersabda,” Barang siapa ingin mencapai kedamaian. Ia harus cakap, jujur, tulus, rendah hati, lemah lembut dan tidak takabur”.

Tentang kebencian dan cinta kasih sang Buddha bersabda,” Kebencian tak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum yang abadi “. (Dhammapada 5).

Tentang kesalahan dan kejahatan orang lain sang Buddha bersabda,” Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri”.

SABDA-SABDA BUDDHA

**Untuk mencapai kedamaian Sang Buddha bersabda,
"Barang siapa ingin mencapai kedamaian. Ia harus cakap, jujur, tulus,
rendah hati, lemah lembut dan tidak takabur".**

**Tentang kebencian dan cinta kasih sang Buddha bersabda,
" Kebencian tak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian tetapi
kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah
hukum yang abadi,"
(Dhammapada 5).**

**Tentang kesalahan dan kejahatan orang lain sang Buddha bersabda,
"Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan
atau yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang
telah dikerjakan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri".**

Miliki Hati Seorang Hamba, Dalam Bekerja dan Melayani

Oleh : Yusep (Pembimas Kristen)



Menjadi tuan atau hamba? Memerintah atau diperintah? Kalau pilihan ini ditujukan kepada kita, pasti banyak orang akan memilih menjadi tuan daripada hamba, memerintah daripada diperintah. Karena menjadi tuan atau bos berarti mempunyai wewenang dan kuasa untuk memerintah, serta dihormati oleh bawahan. Namun tidak mudah bagi seseorang yang menempati posisi 'di atas' dan terhormat untuk mau merendahkan diri dan berbaur dengan mereka yang ada di bawahnya.

Banyak kita yang sudah

mengerti betul tentang jabatan, kedudukan posisi, dan menjadi orang-orang yang terhormat baik dilingkungan masyarakat, instansi tempat kita bekerja yang menunjukkan sikap kita sebagai 'tuan' daripada seorang hamba. Pandangan Kristen Bertitik tolak Di dalam Alkitab Lukas 17 : 10 mengatakan "Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata; Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan".

Begitu pentingnya kita memiliki hati seorang hamba dan tidak memandang rendah

satu sama lain sesama kita.

Sementara menjadi hamba berarti harus siap untuk diperintah serta melayani di mana pun dan kapan pun tanpa punya hak untuk membantah atau mengelak. Jarang sekali orang mau menjadi 'hamba' bagi orang lain. Tapi, inilah salah satu ajaran Yesus. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Yesus, "yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia." (Filipi 2:6).

Justru Dia datang ke dalam dunia ini "...bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." (Matius 20:28). Saat melayani di bumi Yesus harus mengalami penolakan, cibiran dan fitnahan. Namun Dia tetap membuka tanganNya untuk menolong, menyembuhkan dan memberkati mereka.

Bahkan saat di olok-olok, diludahi, dianiaya, disiksa dan sampai mati di atas Kalvari tiada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya yang menunjukkan bahwa Dia kecewa, mengeluh, bersungut-sungut dan dendam terhadap mereka. Justru Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa

yang mereka perbuat." (Lukas 23:34).

Dewasa ini banyak kita yang terlibat dalam pelayanan memposisikan dirinya sebagai 'tuan' daripada hamba. Kita cenderung minta dilayani daripada melayani.

Mudah menggerutu dan bersungut-sungut bila tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau tidak nyaman; Menyadari hal ini sudahkah kita memiliki hati seorang hamba didalam kita bekerja dan melayani? Atau karakter itu sangat jauh dari kepribadian kita masing-masing. Kebanyakan kita sering memilih-milih pelayanan yang istimewa, nyaman dan dengan mendapat imbalan yang banyak, yang

sakit-sakit dan tidak memiliki nilai kita bebaskan kepada orang lain kita maunya langsung terlibat dalam pelayanan besar yang bisa dilihat oleh banyak orang dan dipuji orang itulah itu mungkin yang sering kita lakukan dan kita inginkan. Akhir-akhir ini ada satu lagu yang sangat populer "Hidup ini adalah kesempatan" biarlah kita memanfaatkan untuk melayani Tuhan dan sesama, sehingga hati seorang hamba itu tidak kehilangan esensinya didalam kita bekerja dan melayani.

"Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu;" Matius 20:26-27

**"Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu;"
Matius 20:26-27**



FOTO KERABAT Dokumentasi Rakerwil Kemenag Kalsel



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Rakerwil Kemenag Kalsel.



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi saat menyampaikan materi (Best Practices) dihadapan peserta Rakerwil Kemenag Kalsel



Kabag TU (Tengah) diapit Kabid Penmad dan Pembimas Buddha saat menyampaikan materi dalam diskusi panel Rakerwil yang dipandu oleh Kasubbag Inmas (Ujung Kiri) dan Kasubbag Hukum dan KUB (ujung Kanan).

20 sd 22 Maret 2019 di Grand Dafam Hotel Banjarbaru

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor membuka secara resmi kegiatan Rakerwil Kemenag Kalsel.



Sekjen Kemenag RI Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd saat menyampaikan materi pada kegiatan Rakerwil.



Kapolda Kalsel Irjen Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si saat menjadi Nara Sumber di kegiatan Rakerwil



Kabid PHU (tengah) bersama Kabid Urais & Binsyar serta Kabid Penais, Zakat dan Wakaf menjadi nara sumber Rakerwil pada diskusi panel yang dipandu oleh Kasubbag Ortapeg (ujung kanan) dan Kasubbag Umum (ujung kiri)



Foto bersama Ka.Kanwil dan seluruh peserta Rakerwil

MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

Memaknai Rapat Kerja Nasional
Kemenag 2019



Agabriel Santia (Agabriel) Barong Mubag IRI
Jakarta, 04 Januari 2019

Lukman Hakim Saifuddin

Sumber : HDI Kemenag RI

Pengantar

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama 2019 adalah kegiatan yang ke-lima kalinya saya ikuti. Karenanya saya berharap rapat besar yang digelar selama tiga hari ini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih maju ketimbang lima tahun silam. Setidaknya dapat memberikan kesan manis bagi kita semua.

Saya bersyukur selalu ada yang baru pada tiap Rakernas. Setidaknya dalam dua Rakernasterakhir, kita telah melakukan perubahan signifikan. Rakernas tak lagi sekadar ajang pertemuan rutin antar-pimpinan unit pusat dan daerah. Tak lagi pula menggunakan tema-tema klise yang sulit dicerna. Rakernas Kemenag telah memulai babak baru dengan bahasan yang lebih fokus dan arah yang jelas. Formatnya pun dibikin sesuai kebutuhan menginternalisasikan tema agar tepat sasaran.

Perubahan demi perubahan itu bukan ide yang datang tiba-tiba. Ia diproses melalui evaluasi atas capaian tahun sebelumnya, respons terhadap situasi terkini, hingga antisipasi tren ke depan. Semua proses itu jika dihubungkan, maka bermuara pada satu kata: moderasi.

Ya, sejauh ini kita sesungguhnya telah

coba menjadikan kata “moderasi” sebagai cara bekerja. Kata moderasi mengandung dua makna yaitu, memandu/mengatur/menengahi serta pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Kedua makna itu mirip dan sama-sama aplikatif, menjalankan fungsi kontrol. Memoderasi artinya mengendalikan sesuatu agar tidak kebablasan, menarik hal yang keterlaluan agar berada di jalur yang tepat, dan mengepaskan hal ihwal untuk mencapai keseimbangan.

Dengan demikian, Rakernas adalah sebuah moderasi. Carakita untuk mengendalikan program agar tetap berada dalam kerangka kerja yang tepat, menempatkan masalah dan solusi sesuai porsinya, hingga membumikan visi-misi dalam kegiatan yang konkret. Menyeimbangkan antara semangat berinovasi dan kewajiban menjalankan mandatory, menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dan kemampuan mengendalikan diri, menjadi poros di antara kutub yang saling tarik menarik, dan mengharmoniskan berbagai perbedaan. Melalui serangkaian program yang terukur bagi umat beragama, kita berupaya menghadirkan jalan tengah bagi konservatisme versus liberalisme. Secara kinerja kita berusaha

menjadikan Kementerian Agama sebagai instansi yang tepercaya dalam menyerap aspirasi umat sekaligus unggul dalam melayani publik.

Kata “moderasi” adalah jembatan yang menyambungkan Rakernas satu dengan lainnya sebagai agenda besar yang berkesinambungan. Tindak lanjut dari setiap Rakernas yang tecermin dalam capaian kinerja tahunan adalah rekam jejak yang menandai kemampuan kita dalam menjalankan amanah. Catatan kinerja yang tinggi menjadi penyemangat berprestasi, sementara kinerja yang rendah menjadi bahan introspeksi. Semoga kita mampu menyadari kapan saatnya bereaksi dan di mana harus berposisi.

Pada Rakernas kali ini saya ingin memberi catatan tersendiri. Karena itulah, saya menyiapkan tulisan khusus dalam rapat nasional yang dihadiri tak kurang dari 300 peserta yang sehari-hari menjabat pimpinan unit. Saya menginstruksikan agar catatan ini diteruskan kepada jajaran di bawahnya yang berjumlah 4.590 satker dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) kita yang mencapai 225.730 ribu orang. Selanjutnya, disebarluaskan kepada publik terutama para pemangku kepentingan kita.

Instruksi “diteruskan” bukan berarti sekadar disalin atau dicetak ulang apa adanya (copy-paste) lalu dijadikan lampiran dalam surat edaran. Diteruskan maksudnya adalah dinarasikan secara terus menerus melalui teks-teks baru yang kontekstual agar setiap poin pentingnya terejawantahkan. Sementara “disebarluaskan” bukan pula berarti sekadar meneruskan dan membaginya (forward and share) begitu saja tanpa penyaringan dan penyesuaian. Disebarluaskan maksudnya adalah membumikan substansi catatan ini dalam sanubari publik melalui kegiatan yang produktif dan komunikasi yang efektif.

Pentingnya Pemaknaan ‘Moderasi Beragama’

Saya sengaja memperjelas maksud dari kata-kata di atas agar kita belajar moderat: tidak ekstrem tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Saya percaya Anda semua adalah seorang moderat yang mampu mengukur diri dalam memposisikan substansi dan merespons situasi. Saya berharap Anda pun bisa menjadi moderator yang mampu memoderasi umat beragama. Adapun teknisnya, silakan berkreasi sesuai kemampuan masing-masing, asalkan mengusung pesan yang semakna dan visi yang sama.

Pemaknaan adalah syarat tercapainya efektifitas pesan. Seringkali satu kata menjadi

masalah tersendiri ketika dimaknai berbeda-beda. Semakin tajam perbedaan dalam memaknai kata, semakin runyam masalahnya. Sebaliknya, pemaknaan yang sama akan menghasilkan kesepahaman bersikap yang dapat ditindaklanjuti dalam keselarasan bertindak.

Sebab itulah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ringkasan pemaknaan atas kata kunci “moderasi” sesuai tugas kita dalam bidang agama dan keagamaan. Tujuannya, agar konteks penggunaan kata ini tidak dipahami secara sempit dan tak pula dimaknai terlalu luas apatah lagi disalah-artikan. Untuk ringkasnya, saya menyebut satu mantra sebagai kata magis untuk mempengaruhi khalayak agar kehidupan beragama di negeri ini berjalan sesuai harapan. Mantra itu adalah: **Moderasi Beragama**.

Saya berkali-kali menggunakan mantra ini. Banyak yang sudah paham, tapi masih jauh lebih banyak yang belum tersadar. Di negeri yang amat luas dengan masyarakat yang sangat beragam ini, diperlukan saluran-saluran yang memadai untuk meningkatkan keterpengaruhan mantra. Saya perlu menyatukan pikiran, sikap, dan tindakan Anda semua agar menjangkau seluruh sasaran. Mengubah gerak-gerak kecil di antara kita menjadi sebuah energi besar yang mampu mengantarkan umat beragama dan bangsa ini menuju peradaban yang lebih baik.

Pendek kata, kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Harus berjalan beriringan demi tercapainya target bersama. Hal ini membutuhkan sinkronisasi, sinergitas, kerja sama, dan sejenisnya. Kita biasa mengenalnya dengan “kebersamaan”, sesuai tema Hari Amal Bakti (HAB) ke-73 Kemenag yang kita peringati 3 Januari lalu. Kerja bersama kita diharapkan berpengaruh besar bagi terciptanya kebersamaan umat.

Dalam forum ini saya kembali membuhulkan sekaligus mendefinisikan mantra Moderasi Beragama. Bukan semata agar lebih manjur, tapi juga supaya dapat digunakan dengan benar. Ibarat memberi jimat yang disertai penjelasan. Saya tidak ingin terjadi kekeliruan seperti seorang santri yang menggunakan wirid mahabbah alias ajian pengasih untuk mengobati orang sakit gigi.

Ada beberapa tujuan yang ingin saya capai melalui pelafalan terus menerus kata Moderasi Beragama. Di antaranya:

Pertama, Moderasi Beragama sangat penting dijadikan framing dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Terlebih, seiring

perkembangan teknologi informasi, kita pun menghadapi masyarakat milenial yang juga merupakan umat digital.

Di zaman serba instan seperti sekarang, sangat dimungkinkan meluasnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Semua persimpangan itu rentan menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. Pada posisi ini, Moderasi Beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik.

Kedua, urgensi Moderasi Beragama sesungguhnya tidak perlu diragukan maupun diperdebatkan di kalangan kita. Tapi sayangnya, kata ini belum sepenuhnya dipahami ASN kita apatah lagi diimplementasikan dalam program kerja di pusat maupun daerah. Bahkan nampak ada yang setengah hati menerima konsep moderasi beragama karena takut terkikis keyakinan agamanya. Padahal bersikap moderat tidak memerlukan kompromi untuk mengorbankan keyakinan atas prinsip ajaran pokok agama demi memelihara toleransi dengan umat agama lain.

Saya memaklumi hal ini karena Kementerian Agama memang belum secara resmi menerbitkan buku khusus yang menjadi referensi terkait Moderasi Beragama. Karenanya, saya menginstruksikan kepada tim yang ditugaskan untuk menyusun buku itu agar segera menyelesaikannya. Saya minta paling lambat pada Maret 2019, buku itu sudah terbit sehingga dapat menjadi panduan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ketiga, peserta Rakernas saya harapkan terlebih dulu memahami, meyakini dan menginternalisasikan ruh Moderasi Beragama dengan baik. Dengan demikian, akan siap menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye mantra ini melalui berbagai program sesuai

“
Saya memiliki keyakinan bahwa program-program pelayanan Kemenag akan lebih cepat dan efisien serta berdampak besar bagi umat jika kita bisa mengintegrasikan aset data kita yang volumenya sangat besar (*big data*).



satker masing-masing.

Dalam ulasan ringkas ini, saya tak hendak memberikan tafsir tunggal atas kata Moderasi Beragama yang berlaku di ranah umum. Saya hanya mengkontekstualisasikan tafsir Moderasi Beragama dalam lingkup tupoksi Kementerian Agama sebagai pengawal kebersamaan umat melalui bidang pendidikan dan keagamaan. Itu pun tidak lepas dari public hearing yang diselenggarakan sebagai kewajiban kita kepada publik.

Pada triwulan akhir tahun 2018, Kementerian Agama kembali menyerap aspirasi tokoh publik yang terdiri dari kalangan agamawan, budayawan, akademisi, praktisi media, hingga kaum milenial. Sedikitnya dua kegiatan penting telah digelar. Pertama, pertemuan agamawan dan budayawan yang menghasilkan Permufakatan Yogyakarta. Kedua, pertemuan serupa dengan skala lebih besar yang menghasilkan Risalah Jakarta.

Saya selaku Menteri Agama telah menanggapi kedua hasil pertemuan itu secara terbuka. Banyak hal yang menjadi catatan penting bagi Kementerian Agama. Karena itu, dalam Rakernas ini saya membawa catatan itu agar dapat diterjemahkan dalam program yang konkret. Tentu tidak asal perintah, Rakernas ini telah didahului dengan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan rapatrapat koordinasi di tiap satker. Pembahasan secara berjenjang ini dimaksudkan agar program kerja Kemenag yang berlaku nasional dapat berjalan lancar karena telah direncanakan dengan baik.



Moderasi untuk Kebersamaan

Menurut bahasa, kata ‘moderasi’ berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti “penguasaan diri” (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata ‘moderasi’, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstrem.

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas, moderasi sangat erat terkait dengan toleransi.

Toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Kesediaan seperti itu sama sekali tidak berarti mengganggu, mengurangi, atau bahkan menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita. Justru agama mengajarkan agar setiap kita bersedia menghormati dan menghargai perbedaan keimanan atau keyakinan yang ada pada pihak lain. Berkeyakinan adalah hak setiap manusia yang karenanya wajib dijaga bersama. Kita memiliki ajaran ‘tenggang rasa’, suatu warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan mampu ikut merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita. Suatu nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama.

Mantra ‘moderasi’ sesungguhnya sangat terkait erat dengan mantra kedua, yaitu ‘kebersamaan’. Dalam konteks Kemenag, mantra kebersamaan ini pun terus-menerus digaungkan dan bahkan kita jadikan tema Hari Amal Bakti ke-73 Tahun 2019, yakni ‘Jaga Kebersamaan Umat’.

Karena Rakernas Kemenag 2019 kali ini merupakan rangkaian tak terpisahkan dari semua program Kemenag sebelumnya, maka dua mantra itu digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai tema utama, **“Moderasi untuk Kebersamaan Umat”**.

Pesan moral utamanya adalah bagaimana agar semua program moderasi yang akan dilaksanakan oleh satker Kemenag tahun 2019 khususnya, dapat melahirkan kebersamaan dan penguatan rasa kebangsaan umat.

Kebersamaan antar pemeluk agama yang berbeda-beda mutlak diperlukan. ‘Moderasi’ tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada salah satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Karena moderasi meniscayakan adanya sikap dan tindakan yang berimbang (balance) serta adil (justice). Tanpa keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama menjadi tidak efektif. Moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangnya, keduanya harus mendekat dan saling menjemput titik persamaan ketimbang berkeras ‘mengorek-ngorek’ simpang perbedaan.

2019: Tahun Moderasi

Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan, nyatanya bukan hanya kebutuhan warga Kemenag atau warga Negara Indonesia saja, melainkan juga kebutuhan seluruh umat manusia di muka bumi.

Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan tahun 2019 ini sebagai “Tahun Moderasi Internasional” (The International Year of Moderation). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen kita di Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi dalam konteks beragama.

Karenanya, kita sekarang punya momentum untuk menjadikan Tahun 2019 ini sebagai **Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama!** Caranya dengan menjadikan jargon Moderasi



“
MODERASI tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada salah satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Karena moderasi meniscayakan adanya sikap dan tindakan yang berimbang (*balance*) serta adil (*justice*).”

Beragama sebagai ruh dan kata kunci yang harus menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan yang akan dirumuskan dalam Rakernas 2019 ini.

Moderasi Beragama perlu diejawantahkan dan bahkan dilembagakan dalam sistem dan struktur kerja satker-satker di Kementerian Agama. Ini supaya ruhnya tidak melekat pada seorang Menteri Agama belaka, yang niscaya akan datang dan pergi silih berganti. Moderasi Beragama harus menjadi jiwa institusi Kementerian Agama, yang sepanjang keberadaannya akan terus mendapat amanah untuk mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia.

Mengelola Moderasi dan Kebersamaan di Era Disrupsi

Sekali lagi, mantra ‘moderasi’ dan ‘kebersamaan’ sesungguhnya bukan barang baru dalam kehidupan kita. Kedua istilah itu secara normatif sudah cukup lama dikumandangkan dan diserukan oleh berbagai orang dan berbagai zaman, dalam konteks yang berbeda-beda.

Lalu, mengapa bersikap moderat dan hidup damai dalam kebersamaan itu seolah menjadi barang mahal dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya ketika kita berbicara tentang kehidupan beragama di Indonesia? Dankhususnya lagi kalau mencermati isu-isu keagamaan di media sosial? Mengapa kepercayaan terhadap nilai moderasi dan kebersamaan tenggelam oleh semacam ‘keimanan’ terhadap berita bohong (hoaks)?

Salah satu jawabannya barangkali

adalah karena kita sekarang memasuki era keterbukaan yang nyaris tak terbatas (*borderless*); era keterbukaan dan ketakberbatasan yang diakibatkan oleh perkembangan cepat teknologi informasi, plus gonjang-ganjing politik yang timbulkan kegaduhan di sana-sini. Di era ini, terjadi perubahan mendasar bagaimana cara umat memperoleh pengetahuan agama. Belakangan ini pengetahuan agama tidak lagi selalu didapat melalui proses panjang mengkaji sumber primer yang utama, atau mengikuti pandangan sang guru yang memiliki keutamaan akhlak dan kedalaman ilmu, melainkan melalui jalan pintas yang serba instan, hitam putih, dan sering hanya menyediakan tafsir kebenaran tunggal dalam beragama.

Masalahnya, perubahan serba cepat itu ternyata belum diimbangi dengan kesiapan para pemegang otoritas agama dalam menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sebagian para pemangku agama, dan juga akademisi bidang agama, seperti gagap dan terkaget-kaget menyaksikan perubahan kecenderungan beragama yang begitu cepat; belum tersedia jembatan yang dapat menghubungkan kekayaan wawasan pengetahuan mereka dengan kebutuhan generasi milenial yang sangat cepat dan dinamis.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan era disrupsi, suatu keadaan terjadinya perubahan radikal yang sangat cepat akibat lahirnya era digital. Era ini mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, nyaris mengubah perilaku manusia di semua aspek, tak terkecuali di bidang

agama.

Efek domino era disrupsi di bidang agama inilah yang menjadi alasan mengapa Kemenag, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada akhir Desember 2018 lalu memfasilitasi dialog antariman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat. Syukurlah, dialog itu menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai Risalah Jakarta, yang butir-butirnya sudah saya tanggap, dan bahkan saya minta agar dijadikan sebagai ruh untuk merumuskan program-program Kemenag di Tahun 2019.

Di sini, saya tidak akan mengupas satu per satu ide dalam Risalah Jakarta berikut tanggapan saya atasnya, karena kedua dokumen tersebut juga telah tersedia secara terpisah sebagai lampiran. Saya hanya ingin memberikan konteks, mengapa Risalah Jakarta itu penting, dan untuk apa kita menjadikannya sebagai acuan dalam Rakernas Kemenag 2019.

Tentu Risalah Jakarta ini tidak berdiri sendiri, karena ia sesungguhnya merupakan puncak dari cermin komitmen Kemenag untuk terus menggaungkan Moderasi Beragama demi terus menjaga kebersamaan umat. Bahkan, sebelumnya di awal November 2018, Kemenag juga mengadakan pertemuan agamawan dan budayawan di Yogyakarta, yang kemudian melahirkan 'Permufakatan Yogyakarta'.

Kini, dalam Rakernas Kemenag 2019, tugas kita semua untuk menerjemahkan visi tentang Moderasi Beragama, yang bahan bakunya telah disuplai oleh gagasan-gagasan cerdas puluhan cerdik cendikia yang tertuang dalam Risalah Jakarta, selain tentunya menerjemahkan 6 (enam) Program Unggulan 2019 yang telah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Sentul tanggal 5-7 Desember 2018 lalu.

Moderasi, Kebersamaan, dan Integrasi Data

Saya ingin memaknai bahwa pilihan untuk menempatkan moderasi beragama sesungguhnya adalah bagian dari upaya Kemenag dalam meningkatkan kualitas modal sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan paripurna kepada umat. Tantangannya, di era digital ini, sangat mustahil kita memberikan pelayanan yang baik tanpa melakukan transformasi manajemen data dan informasi yang baik pula. Pelayanan umat di bidang agama dan keagamaan tidak bisa lagi mengandalkan data yang 'basi' atau kadaluwarsa (out of date), lambat, dan parsial, melainkan harus termutakhirkan

(up to date), cepat, dan terintegrasi. Kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi harus dijadikan momentum berbenah diri untuk memberikan pelayanan umat yang lebih cepat, akurat, dan memuaskan.

Pendek kata, di era disrupsi teknologi ini, kunci sukses program pelayanan Kemenag akan sangat dipengaruhi oleh sedetil apa penguasaan kita terhadap data, dan seefisien apa kita mengelolanya: data kebutuhan umat, data tenaga pendidik, data tenaga kependidikan, data peserta didik, data lembaga pendidikan, data rumah ibadah, data pemangku kepentingan Kemenag, semuanya harus terintegrasi dan mudah diakses dengan satu jari.

Saya memiliki keyakinan bahwa program-program pelayanan Kemenag akan lebih cepat dan efisien serta berdampak besar bagi umat jika kita bisa mengintegrasikan aset data kita yang volumenya sangat besar (big data). Akurasi data agama dan keagamaan yang dapat diakses dengan cepat serta terintegrasi akan sangat membantu setiap pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang tepat, efektif, berimbang, adil, moderat, sehingga tidak mengusik kebersamaan dan kerukunan hidup beragama umat.

Atas dasar itulah, maka selain dua mantra: moderasi dan kebersamaan, dalam Rakernas Kemenag 2019 ini, mantra ketiga yang penting kita pahami bersama adalah integrasi data. Dengan integrasi data, kita sesungguhnya juga sedang membangun data bersama. Data yang disusun oleh satu satker, bukan berarti milik satker yang bersangkutan, melainkan data bersama, dan karenanya harus dibagi untuk semua.

Karenanya, selain sebagai Tahun Moderasi Beragama, Tahun 2019 ini hendaknya kita jadikan sebagai Tahun Sadar Data, di mana semua aparat Kemenag harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya data (data awareness/ownership), sehingga tercipta budaya data. Mengapa ini penting kita canangkan? Karena, sekali lagi, data agama dan keagamaan yang valid dan terintegrasi akan menentukan jenis informasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Data dan informasi yang akurat dan berkualitas juga akan sangat menentukan jenis kebijakan yang diambil oleh Menteri Agama, pejabat eselon I, II, dan seterusnya ke bawah.

Akhirnya, mari kita sukseskan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2019 ini dengan selalu mengingat tiga mantra: moderasi, kebersamaan, dan integrasi data.

Menag: HAB Ingatkan Pentingnya Jaminan Hak dalam Beragama



Banjarbaru (Kemenag Kalsel) – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan peringatan Hari Amal Bahakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama (Kemenag) kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam negara kita berdasar Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama,” tegas Lukman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Kamis (03/01/19) di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru.

Tujuh puluh tiga tahun

silam, tepatnya pada 3 Januari 1946 Pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat.

“Kementerian Agama bertugas menjaga kerukunan hidup antarumat beragama agar kian rekat dan pada akhirnya agar kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat,” katanya.

Selanjutnya gubernur Kalsel mengharapkan dengan peringatan HAB ke-73, Kemenag khususnya Kemenag Kalsel bisa lebih baik lagi dan hubungan kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai bidang bisa terus ditingkatkan,

terutama dalam bidang pembangunan keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama. “Tentunya kita berharap yang terbaik,” katanya saat wawancara khusus usai pelaksanaan upacara bendera.

Dikesempatan tersebut, didampingi Ka. Kanwil Kemenag Kalsel dan Rektor UIN Antasari Banjarmasin, gubernur menyematkan Penganugerahan Satya Lencana 30, 20, 10 Tahun kepada 40an Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemenag Kalsel dan UIN Antasari Banjarmasin.

Upacara bendera merupakan acara puncak rangkaian peringatan HAB ke-73 Kemenag setelah sebelumnya diadakan kegiatan lomba olahraga, ziarah ke makam para pendahulu, tasyakuran dan shalat Hajat. (Rep/ Ft: Inmas19)

HAB ke-73, Kemenag Kalsel Terima Sertifikat Hibah Tanah Kantor Baru



Banjarbaru (Kemenag Kalsel) – Bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama (Kemenag), Kemenag Kalsel mendapatkan kado spesial dengan diterimanya hibah tanah untuk Pembangunan Kantor Wilayah Kemenag Kalsel yang baru.

Sertifikat tanah diserahkan secara resmi gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor kepada Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi di hadapan peserta upacara bendera HAB ke-73 Kemenag, Kamis (03/01/19) di Asrama Haji Embarkasi Banjar-

masin di Banjarbaru.

Tanah seluas 10.000 meter persegi yang dihibahkan pemerintah Daerah tersebut, berlokasi di jalan Banjar Selatan kelurahan Bangkal kecamatan Cempaka Banjarbaru dengan hak pakai bagi Kemenag.

Diakui H. Noor Fahmi, kondisi Kanwil Kemenag Kalsel yang sekarang memang kurang memadai karena lokasinya yang terbilang sempit dan tidak memiliki lahan parkir yang cukup.

“Untuk pembangunan be-

lum bisa dilakukan, karena terkait dengan anggaran,” kata H. Noor Fahmi kepada awak media usai ditanya perihal hibah tanah tersebut.

Tidak hanya bagi Kemenag Kalsel, bertepatan dengan pelaksanaan upacara bendera HAB ke-73 Kemenag tersebut, kado spesial juga didapatkan sepuluh orang penerima penghargaan Anugerah Guru, 40an penerima penghargaan Satya Lencana, dan para pemenang lomba olahraga dalam rangka memeriahkan HAB ke-73 Kemenag serta penerima bantuan rumah disabilitas. (Rep/ Ft: Inmas19)

Ka.Kankemenag Pinta ASN Selesaikan SKP



Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kota Banjarmasin Muhammad Rofi'i meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Kota Banjarmasin untuk segera menyelesaikan Laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2018 sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban ASN terhadap kinerjanya selama 1 (satu) tahun.

"Fungsi SKP sangatlah penting untuk dijadikan sebagai pedoman pengembangan karier seorang ASN, peningkatan produktivitas dan tanggung jawab karyawan, peningkatan motivasi pegawai, menghindari pilih kasih dan lebih lagi

sangat bermanfaat dalam hal pengukuran keberhasilan pekerjaan seorang ASN," ungkap Rofi'i saat menjadi Pembina Apel gabungan, Senin (07/01/19) di halaman Kantor Kemenag Kota Banjarmasin.

Selanjutnya Rofi'i meminta ASN segera menyelesaikan SKP sebagai bentuk Akuntabilitas ASN dalam bekerja. "SKP merupakan bentuk akuntabilitas ASN sesuai rencana serta target kinerja yang harus dicapai seorang ASN dalam kurun waktu penilaian tertentu yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasan," katanya.

Lebih jauh Rofi'i mengatakan jika ASN tidak

menyusun SKP dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Tentunya SKP harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, serta uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di Kemenag RI," pungkasnya.

Apel Gabungan merupakan apel rutin bulanan yang dilaksanakan Kemenag Kota Banjarmasin dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kinerja di semua satker di lingkungan Kemenag Kota Banjarmasin. (Rep: Rahmani/ Ft: Yasir)

Kartu Nikah, Lebih Sempel dari Buku Nikah

Banjarbaru (Kemenag Kalsel) - “Kartu nikah, lebih simpel dari buku nikah,” kata H. Humaidi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Banjarbaru saat dimintai pendapat terkait pemberian kartu nikah perwakilan sejumlah pasangan pengantin di wilayah kecamatan Banjarbaru.

Meskipun fungsinya sebagai identitas resmi pasangan pengantin, menurut Humaidi buku kartu nikah tidak menggantikan buku nikah, mengingat data pasangan tercatat pada barcode yang tertera pada kartu nikah.

“Akan tetapi penggunaan buku nikah tetap sebagai bukti tertulis dan dokumen resmi yang tercatat pada KUA,” tutur

Humaidi di kantornya Rabu (06/01/19).

Mengutip dari pernyataan menteri Agama RI Lukman Hakim S Keberadaan kartu nikah bagian dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) bukan sebagai pengganti buku nikah, sehingga keberadaan buku nikah sebagai bukti tertulis otentik tetap terjaga.

Seperti halnya yang di ungkap Kepala KUA Banjarbaru Utara H Rymi Herdian yang menyatakan, kartu nikah hanya berlaku bagi pasangan nikah yang tercatat perbulan Januari 2019.

Ditanya mengenai pasangan yang sebelumnya,

Rymi tegas menjawab tidak ada pengadaan kartu nikah bagi pasangan lama.

“Kartu nikah di Banjarbaru merupakan sebagai pilot project untuk percontohan bagi sejumlah kota dan kabupaten lain, merupakan sebuah kepercayaan besar bagi kemenag untuk menjalankan program ini,” ujarnya.

Mulai saat ini para pasangan pengantin tidak perlu repot membawa buku nikah kemana-mana hanya dengan menunjukkan kartu nikah sebagai bukti penunjang pasangan tersebut sudah menikah, sedangkan buku nikah tetap menjadi pegangan dan disimpan sebagaimana mestinya. (Rep/ Ft: Diyan)



Bank Muamalat Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Banjar



Martapura (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Banjar Drs. H. Izzuddin, M.Ag., mendapat kunjungan dari perwakilan Bank Muamalat dalam rangka kerja sama dibidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Senin (04/02/19) di ruang Kankemenag kab. Banjar.

Dikunjungannya tersebut Bank Muamalat meminta ingin aktif kembali bekerja sama untuk menerima setoran haji

pada tahun 2019 ini, karena pada tahun 2018 yang lalu sudah dibuatkan jadwal untuk seluruh bank- bank syariah agar dapat mudah melakukan setoran haji dan umrah untuk tahun ini.

Dipenawarannya, pihak bank Muamalat juga bersedia untuk memfasilitasi transportasi antar jemput berupa mobil angkutan bagi jema'ah asal kabupaten Banjar yang mana diketahui saat ini kantor Muamalat bertempat di wilayah kota Banjarbaru yang jaraknya lumayan jauh dari kantor PHU

Kemenag Kab. Banjar.

Menanggapi hal tersebut H. Izzudin menyambut kesediaan pihak muamalat untuk menjalin kerja sama dibidang PHU, dan akan segera membuatkan jadwal setoran sesuai format tahun 2018.

“Fasilitas mobil dari bank Muamalat akan mempermudah akses jema'ah agar tidak repot melakukan setor tunai,” singkat Kasi PHU Kankemenag Banjar H. Zullah menambahkan. (Rep/ Ft: Wahid)

Ka. Kankemenag Pinta KUA Berikan Pelayanan Maksimal

Kotabaru (Kemenag Kalsel) – “Gunakan Media Sosial (Medsos) untuk memperkaya wawasan,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Kotabaru Drs.H.Salman,MM, saat membuka secara resmi kegiatan sadar hukum dalam bermedia Sosial.

Dalam menggunakan medsos lanjutnya, harus bijak dan mampu menyaring informasi yang beredar, terlebih dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka informasi yang didapatpun begitu mudah, yang belum tentu kevalidan informasinya.

“Kita harus benar-benar memanfaatkan media sosial dengan cermat dan cerdas, jangan sampai membuat pesan atau menyebar berita yang memicu terjadinya konflik dan perpecahan di masyarakat, sebarlah informasi yang baik dan benar, yang mampu menjaga kondusifitas di masyarakat.” ucapnya, Selasa (19/02/19) di aula 2 Kankemenag Kotabaru.

Menurutnya di era digital sekarang ini yang memberikan kemudahan dalam berintegrasi satu sama yang lainnya, yang tiada batas dalam menerima informasi. Apakah informasi tersebut benar ataupun informasi tidak benar (hoaks).

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih seorang muslim jika kita menerima informasi hoaks dan turut menyebarkan maka menjadi fitnah dan dosa besar,” tegasnya.

Penyuluh Agama Honorar (PAH) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menurut Salman memiliki peran untuk mengajak cerdas dan



cermat dalam menggunakan medsos, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang dapat meresahkan serta mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Salman juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar lebih berhati-hati dan tidak sembarang mengshare berita atau informasi di media sosial, karena akan ada sanksi yang menghadang. “Pertama dosa karena fitnah, kedua bisa kena undang-undang negara yakni UU ITE yang jelas hukumannya bagi penyebar hoaks maupun ujaran kebencian,” ingatnya.

Sementara Kepala Ketua panitia Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag Kotabaru H.Ramadhan, S.Ag.M.Pd.I dalam laporannya menyampaikan dalam menggunakan medsos harus bijak dan mampu menyaring informasi yang beredar, terlebih saat ini

akan diadakan pesta demokrasi, dimana semua informasi dan berita yang berkaitan dengan politik perlu di saring terlebih dahulu kebenarannya.

“Medsos jangan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang, menyebar berita Hoax, menyinggung agama, suku, ras atau menyinggung orang lain,” ujarnya.

Selain itu menurut Salman kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong para pengguna medsos dalam melakukan interaksi dan komunikasi secara layak dan patut. “Mari kita bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial,” ajaknya.

Kegiatan tersebut diikuti Penyuluh Agama Islam (PAI) PNS, PAH PAI Non PNS, Pengawas Madrasah dan PAI serta JFU di lingkup Kemenag Kotabaru. (Rep/ Ft: Aan)

Ka.Kankemenag: Minat Baca Tinggi Merupakan Salah Satu Ciri Masyarakat Modern



Rantau (Kemenag Kalsel) – Untuk meningkatkan motivasi siswa, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tapin mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin dalam melaksanakan Safari Pendidikan.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Tapin H. Mahrus, Safari Pendidikan tersebut merupakan sarana untuk lebih akrab dengan pihak sekolah, baik siswa maupun dewan guru.

Lebih lanjut diungkapkannya, hal tersebut merupakan bukti nyata Pemkab Tapin da-

lam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tapin. “Kita akan terus dukung program ini untuk memajukan dunia pendidikan di Tapin,” katanya saat mengikuti upacara bendera dalam rangka kegiatan safari pendidikan di SMAN 1 Rantau, Senin (04/03/19).

Sementara itu Bupati Tapin H.M Arifin dalam amanatnya mengaku sangat bangga bisa hadir bersama melaksanakan apel pagi di SMAN 1 Rantau.

Selain itu disampaikan, kehadiran pimpinan daerah Tapin itu dalam rangka melaksanakan safari pendidikan sekaligus memberikan motivasi menjelang ujian kepada para

siswa SMAN 1 Rantau. “Kebersamaan seorang pimpinan kepada siswa jangan sampai ada jarak,” sampainya.

Lebih lanjut Bupati berpesan kepada siswa SMAN 1 Rantau, agar tidak ikut-ikutan menggunakan obat terlarang apalagi jadi pengedar. “Berlajar dengan sungguh-sungguh,” pesannya.

Safari tersebut dihadiri Dandim 1010 Rantau, Wakapolres Tapin, Ketua Pengadilan Negeri Rantau, Ka.Kankemenag Tapin, Kepala Dinas Pendidikan Tapin dan Kasat Pol PP Tapin. (Rep/Ft:Humas)

Lantik 12 Pejabat, Ka.Kankemenag Harapkan Manajemen Madrasah Lebih Baik

Barabai (Kemenag Kalsel) (MI).
– Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) H. Saipudin, S.Ag, M.Pd.I melantik 12 pejabat Struktural dan Fungsional, Kamis (28/2/19) di aula Makhraja.

Satu diantaranya H. Muhammad Fikri, S. Ag dipromosikan dari jabatan fungsional umum dilantik menjadi Kepala Tata Usaha MTsN 7 Hulu Sungai Tengah, sementara 11 orang pejabat lainnya dimutasi adalah 3 orang kepala Madrasah Aliyah (MA), 6 orang Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 2 orang Kepala Madrasah Ibtidaiyah

H. Saipudin dalam arahnya mengatakan mutasi sejumlah pejabat dilakukan untuk penyegaran dalam rangka menegakkan suasana dan yang lebih penting lagi nantinya apabila tim auditor datang diharapkan tidak akan jadi masalah karena posisi jabatan yang ditempatinya tidak melebihi stantarnya waktu yang telah ditentukan.

“Jadi intinya mutasi bukanlah sebuah hukuman akan tetapi mutasi lebih tepat sebagai kebutuhan sebuah lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,”

terangnya.

Dikatakannya Kepala Madrasah selalu dituntut maksimal untuk melaksanakan tugas managerial dalam mengurus pendidikan di madrasah, artinya Kepala Madrasah tidak hanya selesai menelaah anggaran kemudian pekerjaan selesai.

“Tetapi bagaimana Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas sebagai manager sekolah yang penuh dengan inovasi,” katanya dikegiatan yang turut dihadiri seluruh Kepala Seksi, Pokjawas, Kepala KUA dan Kepala Madrasah di lingkungan Kankemenag HST tersebut..
(Rep: Rez/ Ft: Sab)



Ka.Kankemenag: Sekarang Zaman Serba IT, Guru Tidak Boleh Gaptek

Amuntai (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) H.Yusran mengungkapkan, sekarang perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat seiring perkembangan zaman. “Sekarang zaman serba IT, untuk itu para guru tidak boleh Gagap Teknologi (Gaptek),” ujarnya saat memberikan arahan pada Workshop Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Guru PAI se Kabupaten HSU, Rabu (06/02/19) di aula Kankemenag.

Kegiatan tersebut diikuti guru PAI dari tingkat SD, SLTP,

SLTA jumlah 60 orang per angkatan dengan total 120 orang.

Dijelaskannya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ip-tek) kini dapat dijadikan media pembelajaran yang tentunya akan membuat lebih efektif dan efisien waktu. Apalagi sebagai guru, zaman sekarang ini menuntut untuk mampu mengembangkan metode pembelajaran yang bervariasi setidaknya menjadikan Iptek sebagai landasan pengembangan kurikulum. “Ilmu bukan hanya didapat di saat pendidikan tetapi juga di dunia IT,” jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkan, profesionalitas seorang

guru menentukan tingkat keberhasilan pendidikan siswa. “Guru harus menjadi guru yang professional,” tambahnya.

Selanjutnya dikatakannya, sebagai guru agama menjadi patokan perkembangan akhlak dan moral siswa karena itu seorang guru harus menjadi yang digugu dan ditiru dan menjadi teladan yang baik.

Diakhir arahnya Ka.Kankemenag memberikan motivasi bahwa kinerja dan profesionalitas seorang guru harus terus ditingkatkan karena itulah diantaranya diadakan kegiatan PPKB tersebut. (Rep:Rita/Ft:Latiful)



Ka. Kankemenag Kukuhkan Pengurus Majelis Talim



Paringin (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Balangan H. Muhammad Yamani mengukuhkan pengurus Majelis Ta’lim Ansyarullah Balangan, Rabu (13/03/19) di gedung FKUB Kemenag Balangan.

Dalam sambutannya Ka.Kankemenag berharap, dengan terbentuknya kepengurusan majelis ta’lim tersebut menjadikan nuansa keagamaan di Kemenag Balangan semakin

semarak.

Lebih lanjut dikatakannya, beberapa bulan lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan dengan adanya pengurus majelis tersebut kegiatan keagamaan yang selama ini telah berjalan dapat semakin terkoordinasi sebagai bagian dari pembinaan mental ASN Kemenag Balangan.

Selanjutnya ditambahkan, kepada seluruh pengurus yang dikukuhkan agar

terus meningkatkan kinerja, dedikasi dan membuktikan bahwa kepengurusan tersebut layak dan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang telah diletakkan di diri masing-masing.

“Saya berharap, seluruh Pengurus yang telah dikukuhkan bahwa jabatan yang diterima bukanlah sebuah kebetulan tapi amanah dari atasan yang dipercayakan kepada ASN yang dinilai memiliki kualitas dan kompeten dibidang yang akan di jalankan,” pungkasnya. (Rep/Ft:Mudi)

Netralitas ASN, Ka.Kankemenag Tabalong Terbitkan Surat Edaran



Tanjung (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Tabalong H. Taufik Rahman, M.Pd menerbitkan Surat Edaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menyikapi pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019.

Taufik menyatakan, agar seluruh ASN dilingkungan Kemenag Tabalong tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengikat khususnya sebagai ASN.

Lebih lanjut Taufik berharap, jangan terpancing dan terprovokasi untuk dukung-mendukung salah satu pasangan calon, tetap jaga netralitas dan ASN tidak boleh menjadi bagian tim sukses dari calon manapun. “Tetap berkomitmen menempatkan peran dan

fungsinya secara proporsional,” tegasnya dihadapan seluruh pimpinan satuan kerja madrasah, KUA Kecamatan, Penyuluh dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), ASN saat Apel di halaman Kankemenag Tabalong, Senin (18/03/19).

Selanjutnya Taufik menuturkan, termasuk juga acara-acara lainnya yang berhubungan dengan partai politik, Taufik mengharapkan ASN Kemenag Tabalong tidak datang demi menjaga netralitas. “Kehadiran ASN diacara politik, berpotensi menimbulkan suara sumbang di masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, seluruh ASN memiliki hak politik, namun ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Netralitas ASN berarti ASN punya hak politik memilih tapi tidak berpolitik praktis,” ucapnya.

Dalam Surat Edaran Ka.Kankemenag Tabalong menegaskan agar ASN netral dan tidak memihak kepada kepentingan apapun, menghindari konflik pribadi, kelompok ataupun golongan, melakukan pengawasan terhadap ASN dimasing-masing satuan kerjanya dan mengupayakan terciptanya iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.

“Saya meyakini masing-masing ASN sudah memiliki pilihan pada Pilpres ataupun Pileg, hanya saja saya menekankan untuk memahami posisinya sebagai pelayan masyarakat bukan politikus sehingga harus senantiasa menjaga jati diri ASN,” tandasnya.

Pihaknya mengatakan media sosial, internet bisa diakses dengan mudah, Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jelas mengikat. “Jangan sampai hanya karena jari menjadikan boomerang bagi diri sendiri,” tegas Taufik.

Ka. Kankemenag berharap agar ASN dilingkup Kemenag Tabalong taat dan patuh atas peraturan yang mengikat ASN dalam politik. “Kita sama-sama menjaga netralitas dengan tidak condong dan tidak berpihak pada partai ataupun pasangan Capres manapun,” pungkasnya. (Rep:Sry/Ft:Rudy)

Ka.Kankemenag: BOS Bantu Siswa Miskin

Marabahan (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Barito Kuala (Batola) Drs. Rusbandi, MA mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu siswa miskin.

Menurut H. Rusbandi, BOS disiapkan pemerintah untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 tahun, dan disalurkan kepada SMA/SMK/MA/ sederajat negeri dan swasta, termasuk juga kepada satuan pendidikan Diniyah formal, satuan pendidikan muadallah pada pondok pesantren

salafiyah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Tujuan digulirkannya program BOS ini adalah secara bertahap membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 12 Tahun,” katanya di Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kab. Batola Tahun 2019 di Aula Al-Ikhlas Kemenag Batola, Kamis (14/03/19)

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan

Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dra. Hj. Halimatussadiyah, M.Pd menyampaikan materi Kebijakan Kemenag Tentang BOS, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. (Rep/ Ft: Yana)



Ka. Kankemenag Imbau ASN Jaga Integritas



Kantor Kemenag Tala.

Menurutnya integritas harus perlu dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Integritas harus dipegang teguh karena dasar nilai budaya kerja kementerian agama,” ujarnya.

Kemenag Tala juga mengajak kepada semua jajarannya untuk menyikapi dengan baik atas keprihatinan yang terjadi di Kementerian Agama.

“Mari kita bekerja sama menjaga integritas dan mengevaluasi terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan Kementerian Agama dan menegakkan etika, disiplin, serta tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat pengabdian dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat,” ucapnya.

Pelaihari (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kemenag) Kab. Tanah Laut H.M. Rusdi Hilmi mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) pentingnya menjaga integritas dalam bekerja. Hal tersebut ditegaskannya saat membina apel kesadaran, Senin (18/03/19) di Halaman

Terakhir Ka.Kemenag mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Kepala KUA se Kabupaten Tanah Laut jangan ada pungutan liar yang terjadi dilingkungan Kantor Urusan Agama khususnya biaya pernikahan.

Pasalnya jika ada yang melakukan tindakan tersebut Ka.Kemenag tidak akan segan – segan memberikan sanksi terhadap Kepala KUA. “Alasan apapun tidak ada pungutan yang terjadi di lingkungan KUA,” harapnya.(Rep/ Ft: Tini)

Ka. Kankemenag Pinta KUA Berikan Pelayanan Maksimal



Kandangan (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Saribuddin, M.Pd.I meminta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung memberikan pelayanan secara maksimal.

“Berikan Pelayanan Yang Disenagi oleh masyarakat, ujarnya saat melakukan sidak di KUA Kecamatan Padang Batung, Jum’at (15/03/19).

Ka.Kankemenag Minta Masyarakat Selalu Waspada Berita Provokatif

Batulicin – (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs.H.Abdul Basit, MM meminta kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap berita provokatif.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) menjelang pemilu 2019, Selasa (26/03/19) di Rumah Makan Bumbu Kecamatan Simpang Empat.

Lebih lanjut H. Basit mengimbau, seluruh pihak menjelang pemilu terkhusus para kandidat dan tim sukses yang bertarung pada Pemilu 2019 untuk menghindari berita hoax maupun berita negatif. Kandidat yang berkompetisi pada Pilpres dan Pileg sebaiknya berada gagasan maupun program untuk menjadi yang terbaik ketimbang saling menghujat dan menjatuhkan.

Selanjutnya ditambahkan, kalau ada berita maka



tabayyun (teliti) terlebih dahulu, cermati sumbernya darimana sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 :

Sementara itu Kepala Polres yang diwakili Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Kompol Norwasis mengungkapkan, melalui kegiatan FGD Tentang maraknya pemberitaan hoax jelang pemilu 2019 diharapkan semua jajaran lembaga dapat menjaga dan menciptakan suasana harmonis serta kondusif di daerah Tanbu untuk memerangi pemberitaan hoax.

“Tujuan dan harapan utama, masyarakat akan paham dan mengerti serta tidak menjadi korban hoax dari pelaku penyebar hoax maupun upaya gerakan radikalisme dari pihak tertentu,” imbuhnya.

Selain itu Norwasis menuturkan, seluruh elemen pemerintahan harus berperan aktif dimasyarakat, untuk mengantisipasi terjadinya paham dan adanya organisasi radikal yang tersebar. “Lakukan sosialisasi yang maksimal kepada warga, dan tetap jaga keamanan

Menurut H. Saribuddin pelayanan di KUA membawa nama Kemenag, karenanya KUA harus benar-benar memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap umat yang datang untuk berurusan. “Utamakan memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang datang dari pada pekerjaan dan urusan pribadi,” tegasnya.

Selanjutnya H. Saribuddin menyampaikan, perkembangan zaman dan teknologi cukup pesat, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara maksimal agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. “Citra baik layanan kepada masyarakat yang dilakukan KUA Kecamatan, mencerminkan citra baik Kementerian Agama,” ucapnya.

Sementara Kepala KUA Kecamatan Padang Batung Mahyudin, S.H.I berharap kedatangan Ka.Kankemenag dapat memberikan energi dan semangat serta motivasi untuk terus bekerja dengan baik dan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan maksimal. “Kedatangan Kepala Kemenag sangat berharga bagi kami dalam peningkatan kinerja dan pelayanan,” katanya. (Rep/ Ft: Bahrul)

Congratulations!



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel
H. NOOR FAHMI

Menerima Piagam Penghargaan
Kemenag Award Terbaik 3
untuk kategori Satuan Kerja Pengelola Website Terbaik.

Yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI
M. NUR KHOLIS SETIAWAN

pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Kementerian Agama 2019
di Shangri La Hotel Jakarta, Rabu (23/01/19)



kanwilkalsel@kemenag.go.id



@kemenagkalsel



@kemenagkalsel



kemenagkalsel



kalsel.kemenag.go.id